



Judul : Korupsi KTP-EL : KPK Terus Dalam Kecelakaan Novanto
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KORUPSI KTP-EL

KPK Terus Dalam Kecelakaan Novanto

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami peristiwa kecelakaan yang menimpa Setya Novanto, mantan Ketua DPR, pada 16 September 2017, yang diduga sebagai upaya menghalang-halangi penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Pemanggilan sejumlah pihak yang berada di lokasi kejadian hingga pasca-kecelakaan terus dilakukan tim KPK.

Bekas kontributor salah satu televisi swasta, Hilman Mattauch, menjadi salah satu yang hadir untuk memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1). Hilman sudah pernah diminta keterangan pada 11 Desember 2017 berkaitan dengan posisinya sebagai sopir mobil yang menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, tersebut. "Melanjutkan pemeriksaan yang sebelumnya," kata Hilman sesuai diperiksa.

KPK pun sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Hilman bepergian ke luar negeri pada 8 Desember 2017. Selain Hilman, ada tiga orang yang juga dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Mereka adalah bekas pengacara Novanto, Fredrich Yunadi; ajudan Novanto, Reza Pahlevi; dan anak buah Yunadi, yaitu Achmad Rudyansyah.

Pencegahan tersebut dikeluarkan bertepatan dengan mundurnya Yunadi sebagai salah satu kuasa hukum Novanto. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Yunadi pernah dipanggil untuk penyidikan ini, tetapi menolak hadir.

"Mereka dibutuhkan keterangannya dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dengan tersangka SN sehingga dilakukan pencegahan agar tidak ke luar negeri. Sebagian (dari empat orang) sudah diperiksa untuk klarifikasi lebih lanjut. Namun, ketika ada saksi dipanggil tidak datang, KPK tidak bisa melakukan upaya paksa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK pernah menggunakan pasal yang sama (menghalangi penyidikan kasus korupsi) terhadap politisi Partai Golkar, Markus Nari.

Sementara itu, terkait kasus korupsi pengadaan KTP-el, penyidik KPK kemarin memeriksa saksi untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Lima politisi dipanggil untuk memberi keterangan, tetapi seorang di antaranya, yakni Jazuli Juwaini, meminta penjadwalan ulang karena ada keperluan lain.

Politisi PDI-P yang juga Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, sesuai pemeriksaan membantah pihaknya selaku Badan Anggaran ikut bermain dalam proses pembahasan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun ini. Menurut Olly, persetujuan terkait besaran anggaran berasal dari pemerintah.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan, Numan Abdul Hakim, juga menampik meminta dana untuk proyek KTP-el meski saat itu duduk di Komisi II DPR. (IAN)